

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

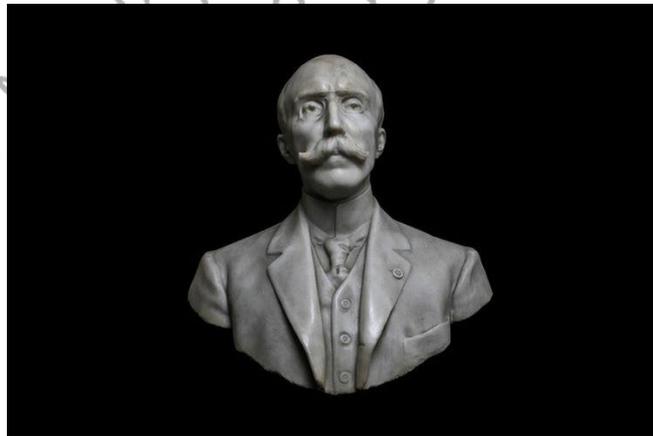
2.1. Sejarah Perusahaan

Pengertian pertanian menurut (Deddy Wahyudin, *et al.*, 2020) adalah suatu aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan – bahan yang dapat digunakan untuk mengelola lingkungan hidup manusia. Usaha tani atau *farming* adalah bagian utama dari pertanian yang melekat dengan sekumpulan kegiatan pelaksanaan budidaya. Sebutan bagi individu yang menjalankan usaha tani adalah petani. Contoh dari petani adalah petani beras atau petani bawang putih. Sedangkan, pertanian adalah sekumpulan kegiatan yang merubah lingkungan dengan tujuan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Dari masa penjajahan sampai masa sekarang, sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor – sektor tersebut mempunyai arti penting untuk menentukan penciptaan dari berbagai realitas ekonomi dan sosial dalam kemasyarakatan di Indonesia.

Indonesia disebut memiliki iklim yang tropis dan letak geografis yang cukup strategis. Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini memberikan pengaruh kepada Indonesia berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kondisi tersebut membuat sektor pertanian di Indonesia menjadi hal penting bagi ekonomi Indonesia. Karenanya, petani merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Petani Indonesia sangat banyak menghasilkan produk usaha, mulai dari produk - produk kehutanan, peternakan, perikanan, dan produk - produk usaha lainnya. Banyaknya produk - produk usaha yang dihasilkan oleh petani lokal menjadikan Indonesia sering disebut sebagai negara agraris.

Dengan banyaknya petani dan hasil tani yang begitu melimpah, maka diperlukan sebuah Departemen atau Organisasi yang bekerja untuk menangani sektor pertanian dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan, serta untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada masa penjajahan Belanda, sebuah Departemen dibentuk untuk membantu mengurus sektor pertanian di Indonesia, dengan Dr. Melchoir Treub yang menjadi direktur pertamanya. Departemen yang dikepalai oleh Dr. Melchoir Treub bernama Departemen Pertanian. Sementara saat masa penjajahan Jepang, sektor pertanian diurus oleh Gunseikanbu Sangyobu. Urusan – urusan sektor pertanian saat zaman penjajahan Belanda dan Jepang dikuasai oleh penjajah, sedangkan petani lokal dijadikan buruh pekerja yang tidak diperlakukan secara manusiawi.



Gambar 2.1 Dr. Melchoir Treub
Sumber: Kompas.com

Sejak 19 Agustus 1945, sektor pertanian berada di bawah kendali Kementerian Kemakmuran. Kementerian ini merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan, dengan Ir. R. P. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Karena situasi Indonesia yang kacau selama dijajah Belanda, didirikanlah cabang Kementerian Kemakmuran yang terletak di Magelang. Cabang ini dikepalai oleh R.M. Reksohadiprojo. Lalu pertengahan tahun 1947, kantor Kementerian dipindahkan ke Yogyakarta.

5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dalam pembentukan Kabinet Kerja dan ditetapkan perubahan nama Kementerian Pertanian menjadi Departemen Pertanian. Dalam membuktikan dirinya ke

arah positif, Departemen Pertanian mulai memperlihatkan keberhasilan dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian, dengan adanya PERPRES No. 47 Tahun 2009 seluruh nama kelembagaan negara yang tadinya bertajuk Departemen Negara diganti menjadi Kementerian Negara. Dalam ketentuan tersebut mencakup pergantian nama yang tadinya Departemen Pertanian menjadi Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sekarang, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024.

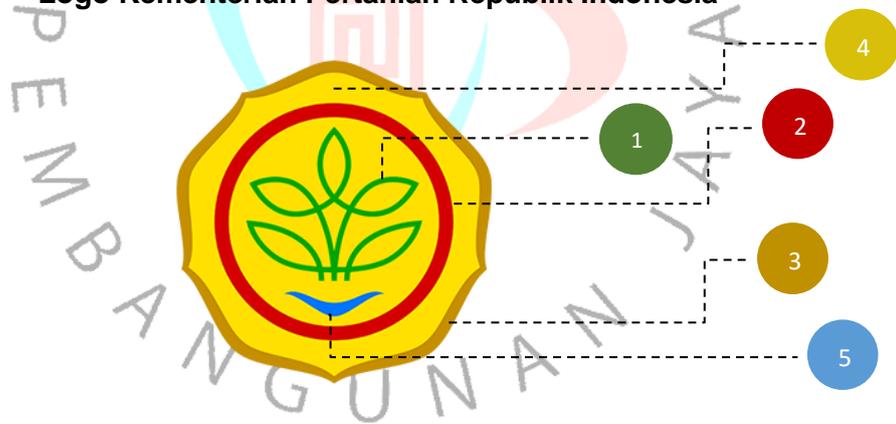


Gambar 2.2 Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sumber: DetikNews



Gambar 2.3 Syahrul Yasin Limpo
Sumber: pertanian.go.id

2.1.1 Logo Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Gambar 2.4 Logo Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sumber: pertanian.go.id

- 1) Tunas, menggambarkan pengertian Biologis dari semua kegiatan yang dikelola oleh Kementerian. Kecuali manusia, sebagai benda hidup. Hijau Muda melambangkan arti kehidupan.
- 2) Lingkaran Merah melambangkan arti kesatuan.

- 3) Lingkaran Coklat yang memiliki lima sudut melambangkan tugas pokok Kementerian Pertanian.
- 4) Kuning Emas, warna dasar untuk Panji maupun Vandel sebagai lambang kemegahan.
- 5) Air Biru Muda melambangkan keagungan.

2.1.2 Visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Makna dari visi tersebut adalah majunya sektor pertanian yang ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan para petani dalam negeri. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan yang didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

2.1.3 Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Pemaknaan misi ini yaitu ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan. Hal ini dicerminkan dengan tersedianya pangan yang cukup, dilihat dari jumlah dan mutu dari pangan itu sendiri. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin pangan yang aman, bergizi, beragam, serta terjangkau agar masyarakat Indonesia dapat hidup sehat dan menjadi produktif dalam melakukan kegiatan sehari - hari. Pengertian daya saing pertanian adalah bagaimana cara instansi yang bekerja pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Instansi terkait juga harus bisa membedakan produknya dengan produk pesaing dengan

menanamkan nilai tambah yang membuat masyarakat menjadi tertarik dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan.

Penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian dilihat dari tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- 3) Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

2.1.4 Penghargaan yang Diperoleh

Subbagian Kearsipan, tempat Praktikan melaksanakan kerja profesi, adalah salah satu subbagian dalam Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian yang cukup sering mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan juga penghargaan lainnya. Beberapa penghargaan yang dapat didokumentasikan Praktikan saat pelaksanaan kerja profesi adalah:

- 1) Penghargaan Dalam Rangka Sistem Tata Kelola Arsip Dinamis Tahun 2017 dari Kementerian Perindustrian.



Gambar 2.5 Penghargaan 1 (kanan)
Sumber: Pribadi

- 2) Juara I Lomba Tertib Arsip Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013.



Gambar 2.6 Penghargaan 2
Sumber: Pribadi

UNIV
PEMBANGUNAN JAYA

- 3) Juara III Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2016 Arsiparis PNS Kategori Keterampilan.



Gambar 2.7 Penghargaan 3
Sumber: Pribadi

- 4) Juara Harapan I Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2017 Kategori Kementerian dari ANRI Award 2017.

- 5) Juara II Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2016 Tingkat Kementerian dari ANRI Awards 2016.



Gambar 2.8 Penghargaan 4 (kiri) dan Penghargaan 5 (kanan)
Sumber: Pribadi

2.2. Struktur Organisasi

(Gill Corkindale, 2011) menulis bahwa “Desain dan struktur organisasi yang buruk menghasilkan kontradiksi yang membingungkan: kebingungan dalam peran, kurangnya koordinasi antar fungsi, kegagalan untuk berbagi ide, dan pengambilan keputusan yang lambat membuat manajer menjadi kompleks, stres dan konflik,”. Dari kutipan beliau dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap instansi. Menyusun struktur organisasi adalah awal mula dari pembentukan suatu instansi/perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka internal perusahaan dapat menjalankan komunikasi dengan lebih baik, memiliki garis komando yang jelas, serta dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efisien.

Biro Umum dan Pengadaan adalah bagian dari Sekretariat Jenderal. Biro ini bertugas dan berfungsi untuk membantu melaksanakan urusan Kementerian Pertanian dengan menyelenggarakan dan berkoordinasi dalam hal kearsipan, rumah tangga, tata usaha, dan layanan penyediaan

barang dan jasa yang telah diatur dalam Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015.

Struktur Organisasi Biro Umum Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut:



Gambar 2.9 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan
Sumber: docplayer.info

2.2.1 Bagian Kearsipan dan Tata Usaha

- Mengelola arsip dan dokumentasi, serta menyiapkan bahan bimbingan yang akan digunakan untuk hal kearsipan Kementerian Pertanian.
- Menerima surat masuk dan keluar, serta melaksanakan bimbingan dalam hal tata usaha dalam Kementerian Pertanian.
- Mengurus bagian tata usaha dan rumah tangga pada Biro Umum dan Pengadaan, melaksanakan urusan tata usaha pada Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Subbagian Kearsipan, tugasnya adalah:
 - a. Menyiapkan bahan bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian.
 - b. Mengelola bagian arsip dan dokumentasi.
- 2) Subbagian Persuratan, tugasnya adalah:
 - a. Mengurus surat yang masuk dan keluar.
 - b. Mengadakan bimbingan dalam hal tata usaha.
- 3) Subbagian Kearsipan Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, dan Biro, tugasnya adalah:
 - a. Melakukan aktivitas tata usaha yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.
 - b. Melakukan aktivitas tata usaha dan rumah tangga yang dilakukan oleh Biro Umum dan Pengadaan.
- 4) Subbagian Tata Usaha Menteri, bertugas melakukan pelayanan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

2.2.2 Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga memiliki tugas dan fungsi sebagai:

- a) Memelihara sarana dan prasarana Kantor Pusat, Rumah Dinas Jabatan, dan Wisma.
- b) Melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.
- c) Melakukan kegiatan yang menyangkut keamanan serta ketertiban yang terjadi di kantor pusat, rumah dinas jabatan, dan wisma.
- d) Mengelola transportasi pegawai – pegawai Sekretariat Jenderal.

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- 1) Subbagian Keamanan dan Angkutan, yang mempunyai tugas dalam mengelola sarana dan prasarana Kantor Pusat.
- 2) Subbagian Pemeliharaan, yang mempunyai tugas dalam mengelola keamanan dan ketertiban Kantor Pusat dan transportasi pegawai Sekretariat Jenderal.
- 3) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, yang mempunyai tugas mengelola pelayanan rumah tangga pimpinan.

2.2.3 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas dan fungsi sebagai:

- a) Mempersiapkan hal - hal tentang pembinaan, perencanaan, dan pemantauan untuk pengadaan barang dan jasa.
- b) Memberikan layanan administrasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

- 1) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, bertugas mengadakan layanan administrasi pengadaan barang dan jasa.
- 2) Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Barang dan Jasa, melakukan persiapan bahan - bahan dalam hal pembinaan, perencanaan, dan pemantauan pengadaan barang dan jasa.

2.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan peraturan perundang – undangan, Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa bertugas dan berfungsi untuk melakukan kegiatan yang sesuai pada jabatan fungsional masing - masing.

2.3. Kegiatan Umum Perusahaan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan urusan yang berkaitan dengan pertanian. Tugas inti ini dilakukan untuk membantu Kepala Negara (Presiden) untuk melaksanakan pemerintahannya. Struktur organisasi Kementerian Pertanian sendiri meliputi Menteri Pertanian, Staf Ahli, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Badan Penelitian & Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan & Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian, Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman & Perizinan Pertanian, Pusat Perpustakaan & Penyebaran Teknologi Pertanian, serta Pusat Sosial Ekonomi & Kebijakan Pertanian.

Subbagian Kearsipan berada dalam Bagian Kearsipan dan Tata Usaha, Biro Umum dan Pengadaan. Subbagian Kearsipan bertugas menyiapkan bahan bimbingan kearsipan, pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Bagian Kearsipan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan kearsipan. Sementara, Biro Umum dan Pengadaan adalah salah satu biro yang berada di dalam Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Biro ini memiliki fungsi manajemen untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, terutama pada bagian manajemen pelayanan pengadaan barang atau jasa. Namun, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sendiri memiliki tugas melaksanakan fungsi manajemen pendukung dan pelaksanaan tugas lainnya.